



RENJA POKOK TAHUN 2026

**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
KABUPATEN WAJO**

PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik sebagai bentuk acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD.

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) ini sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrembang tahunan.

Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indicator kinerja kegiatan serta pagu inductif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo tahun 2027 mendatang.

Sengkang, Oktober 2025

Plt. KEPALA DINAS,



Drs. ANDI BAU MANUSSA, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19651128 199002 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA OPD	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	22
2.3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RENJA	54
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	72
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	94
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	95
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap SPM	93
4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap OPD TPB/SDGs	94
4.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	96
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH	
5.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah	99
5.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi OPD pengampu SPM	101
5.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)	102
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kaidah Pelaksanaan	103
6.2 Kesimpulan	105
LAMPIRAN	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 566.I/VII/TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS
PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN WAJO
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai daerah. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Rencana pembangunan pemerintahan daerah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat RENJA adalah dokumen perencanaan tahunan untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses pembangunan daerah, hendaknya mempertimbangkan upaya optimalisasi sumber-sumber daya yang dimiliki daerah dan peningkatan pemahaman kebutuhan masyarakat dan daerah yang digunakan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program pembangun. Olehnya itu, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu disusun rencana pembangunan daerah yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran Rancangan Akhir Renstra Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029. Hal ini mengacu pada Pasal 75 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja merupakan penjabaran dari Renstra yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas perangkat daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Pentahapan penyusunan dokumen Renja meliputi :

- (1) Penyusunan rancangan awal Renja;
- (2) Rancangan Renja;
- (3) Rancangan Akhir Renja;
- (4) Penetapan Renja

Dan pada penyusunannya, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 menggunakan pendekatan yang terdiri dari :

1. Pendekatan Politik;

Pendekatan politik yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Pendekatan perencanaan tersebut ditunjukkan dengan diakomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo.

2. Pendekatan Teknokratik;

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan, keterwakilan, kelompok masyarakat rentan termarginalkan, transparansi dan akuntabilitas, serta rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus pada semua tahapan penting pengambilan keputusan.

4. Pendekatan Bottom Up;

Pendekatan Bottom Up merupakan proses yang dilakukan secara berjenjang mulai Musrenbang Desa / Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Dilaksanakan sejak Bulan Februari Tahun 2025, dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Kabupaten Wajo yang dilaksanakan pada bulan Maret 2025 Sedangkan tahapan dalam Penyusunan Renja OPD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 melalui beberapa tahapan, yakni: penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum konsultasi publik, pelaksanaan Musrenbang, penyusunan rancangan akhir dan penetapan rencana kerja.

5. Pendekatan Top Down

Pendekatan Top Down dapat diimplementasikan dalam bentuk dedikated program yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi Penyusunan RENJA yang mengacu kepada tiga Dimensi Pembangunan yang tertulis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pada Tahun 2026 ini, selain kelima pendekatan tersebut di atas, dalam penyusunan RENJA Perangkat Daerah telah menggunakan pendekatan holistik, integratif, spasial dan tematik. Kesemuanya itu dituangkan dalam model penganggaran berbasis money follow program. Pun memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi, yaitu Kolaborasi Pendanaan Pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Pinjaman Daerah, CSR, dan Obligasi Daerah. Kondisi ini disatukan agar program prioritas dapat tercapai secara optimal dan segera dilakukan percepatan yang terintegrasi.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan RENJA;

Penyusunan rancangan RENJA Perangkat Daerah berpedoman pada RENSTRA Kabupaten Wajo Tahun 2025 – 2026 yang memuat pendahuluan, evaluasi kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan rencana program prioritas daerah.

Rancangan RENJA Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Wajo kepada Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik yang dimaksudkan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan RENJA.

2. Rancangan RENJA;

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo. Verifikasi dimaksud untuk mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan RKPD.

Dalam tahapan penyusunan rancangan RKPD juga memperhatikan hasil Musrenbang desa/kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam penyusunan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Wajo.

3. Rancangan Akhir RENJA;

Penyusunan rancangan akhir RENJA Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan berita acara hasil Musrenbang RKPD Kabupaten. Rancangan akhir RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2026 yang telah dirumuskan dalam Musrenbang Kabupaten Wajo selanjutnya dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo pada Desk Musrenbang. Pembahasan dimaksud untuk memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD. Pada saat bersamaan, dilakukan evaluasi terhadap hasil musrenbang nasional RKP dan musrenbang RKPD provinsi untuk kabupaten/kota guna memperoleh tambahan informasi atau kebijakan yang harus diacu atau diselaraskan dalam rancangan akhir RKPD.

Secara diagramatis skema alur penyusunan rancangan akhir RENJA Perangkat Daerah sebelum penetapannya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rancangan Akhir RENJA Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2026 dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka mendukung kebijakan keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
26. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 87/M.PPN/HK/10/2024 tentang Penetapan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo.
31. Peraturan Bupati Wajo Nomor 110 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 109);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2026 adalah:

1. Memberikan pedoman dan arah pembangunan Kabupaten Wajo dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Rancangan RENJA dimaksudkan sebagai landasan penyusunan rancangan RENJA;
5. Terdokumentasikannya kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2026 adalah :

1. Tersedianya dokumen RENJA Disporapar Kabupaten Wajo Tahun 2026 yang berpedoman pada Rancangan Akhir RENSTRA Kabupaten Wajo Tahun 2025– 2029;
2. Penyusunan RENJA Disporapar Kabupaten Wajo Tahun 2026 bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah serta memuat secara jelas rencana program, kegiatan, dan subkegiatan;
3. RENJA Disporapar Tahun 2026 disusun untuk menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang nantinya digunakan sebagai landasan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026;
4. RENJA Disporapar Kabupaten Wajo Tahun 2026 bertujuan untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
5. RENJA Disporapar Kabupaten Wajo Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjadi tolak ukur dalam menilai sejauh mana capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diwujudkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah menentukan sistematika Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi, serta tindaklanjutnya dengan penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo serta Keputusan Bupati Wajo tentang Penetapan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Memuat uraian ringkas tentang sasaran penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan organisasi penyusunan dokumen Renja terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Reviu terhadap rancangan awal RENJA

Reviu terhadap rancangan awal RENJA dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran

program/kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program.kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Pagu indikatif masih berpedoman pada pagu indikatif RENSTRA OPD di Tahun 2026.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dilakukan telaahan terhadap usulan-usulan yang diusulkan Masyarakat dan pemangku kepentingan serta pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian dilapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang dan forum Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Pada sub bab ini yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi sesuai dengan urusan OPD terkait.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD, kesesuaian Renstra OPD. Pada bab ini Renja OPD harus menampilkan program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung langsung tujuan sasaran perangkat daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap SPM.

Memuat penjelasan mengenai analisis data pengampu SPM yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif.

4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan OPD terhadap TPB/SDGs.

Memuat penjelasan mengenai analisis data pengampu TBP/SDGs yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif.

4.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perumusan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah. Perumusan kegiatan dan sub kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan kegiatan dan subkegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas kegiatan dan subkegiatan. SKPD menurut rancangan awal RENJA, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

5.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Perangkat Daerah merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai melalui RENSTRA.

BAB VI. PENUTUP

Uraian penutup berisikan di antaranya catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tindak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi merupakan penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan. sehingga secara prinsip evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun 2023 dan sebagian telah dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2023. Proses ini sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi akan dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo dan pencapaian Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun berjalan Kabupaten Wajo
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wajo

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Capaian Renstra OPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rata-rata realisasi kegiatan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%	
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	2	3	3	100%	3	800%	100%	
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	0	1	1	100%	1	200%	100%	
2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	0	1	1	100%	1	200%	100%	
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	1	1	1	100%	1	300%	100%	

2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	0	1	1	100%	1	200%	100%	
2.19.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	0	0	0	#DIV/0!	0	0%	100%	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68	34	34	34	100%	34	10200%	100%	
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	1	1	1	100%	1	300%	100%	
2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	0	0	0	#DIV/0!	0	0%	100%	
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%	
2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	0	0	0	0%	0	0	0%	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%	
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	5	5	5	100%	5	1500%	100%	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	5	5	5	100%	5	1500%	100%	

2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	2	2	2	100%	2	600%	100%	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	4	4	4	100%	4	1200%	100%	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%	
2.19.01.2.08.0001	Pelayanan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8	150	150	150	100%	12	312	100%	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8	12	12	12	100%	12	36	100%	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8	4	4	4	100%	4	4	100%	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	6	6	6	100%	6	6	100%	
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan dan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	5	5	5	100%	5	5	100%	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Pembinaan Kepemudaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%	

2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	50	25	25	25	100%	150	200	75%	
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	40	20	20	20	100%	50	0	0.00%	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Area Sport yang representatif	100%	25%	50%	75%	150%	90%	190%	211%	
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan prasaran olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	10	5	25	25	100%	28	5	0.00%	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prestasi olahraga	32	16	17	17	100%	0	3300%	0%	
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	40	1	1	1	100%	0	0	0%	
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	10	0	10	10	100%	10	5	75.00%	

2.19.03.2.02	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet berprestasi ditingkat provinsi	33	16	17	17	100%	0	3300%	0%	
2.19.03.2.02.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	10	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0.00%	
2.19.03.2.02.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	5	5	0	0	#DIV/0!	0	0	0.00%	
2.19.03.2.02.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	10	5	0	0	#DIV/0!	0	0	0.00%	
2.19.03.2.02.0010	Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	2	1	1	1	100%	1	3	0.00%	
2.19.03.2.02	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	1	1	0	0	#DIV/0!	0	100%	0%	
2.19.03.2.02.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2	1	1	1	100%	0	2	0.00%	
2.19.03.2.02	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan	2	100%	0	0	#DIV/0!	0	100%	0.00%	
2.19.03.2.02.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2	1	1	1	100%	1	3	0.00%	
2.19.03.2.02.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2	1	1	1	100%	1	3	1.00%	

2.19.04	PROGRAM PPENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan pembinaan pramuka	100%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0	100%	100%	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi pramuka yang aktif	100%	0%	0	0	#DIV/0!	0	0%	0.00%	
2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	2	0	0	0	0%	1	1	100.00%	
5.26.02.2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PAD sektor pariwisata	0,10%	0,08%	0,09%	0,09%	100%	0	0%	0%	
5.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata kab/kota yang dikelola	3	3	3	3	100%	0	600%	0.00%	
5.26.02.2.03.004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2	1	1	1	100%	0	0	0.00%	
5.26.02.2.04.006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	20	10	10	10	100%	0	0	0.00%	
5.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata daerah yang diterbitkan	10	0%	0	0	#DIV/0!	0	10%	0.00%	
5.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha melaksanakan standar usaha risiko mengengah rendah di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	20	10	10	10	100%	0	0	0.00%	

3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan wisata	36,06%	33.69	34.91	0	0%	34.91	0%	0%	
3.26.032.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi, kawasan, daya tarik wisata Kab/Kota yang dipasarkan dalam dan luar negeri	32	20	22	22	100%	0	10%	0.00%	
3.26.032.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Ekonomi Kreatif	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2	1	1	1	100%	1	1	0.00%	
3.26.032.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2	1	1	1	100%	1	3	100.00%	

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja menguraikan tentang hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan Dokumen Perubahan Renstra sebagai acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja. Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD. Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja menguraikan tentang hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan Dokumen Perubahan Renstra sebagai acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan Perubahan Tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik secara kuantitas dan kualitas
2. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas yang masih minim
3. Lemahnya koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan
4. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, Renja maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Renja tahun 2026 merupakan tahun keempat perencanaan pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Tahun 2025 - 2029. Prioritas pencapaian sasaran pembangunan daerah disusun secara seksama mengingat banyaknya program yang harus dijalankan dengan keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah.

Pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo pada tahun 2026 sebagian besar sesuai dengan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Tahun 2026 dan secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang berarti target dalam Renstra hampir semua tercapai atau dengan kata lain dapat menyelesaikan

pekerjaan yang menjadi beban tahun yang bersangkutan. Hal tersebut tercermin dalam Tabel 2.1 yang berisi Rekapitulasi, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

2.2.1 Tugas, Fungsi dan Kedudukan Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Pemerintah Kabupaten Wajo. Sedangkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo diatur dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 110 Tahun 2019.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Pemerintah Kabupaten Wajo diatur bahwa “Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Selanjutnya, untuk menjalankan tugas tersebut di atas, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2.1.1 Kepala / Pimpinan

1) Tugas Pokok

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, merumuskan program kerja, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemuda, olahraga dan pariwisata .

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang sekretariat, pembinaan kepemudaan, pembinaan keolahragaan, destinasi dan industri pariwisata, pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang sekretariat, pembinaan kepemudaan, pembinaan keolahragaan, destinasi dan industri pariwisata, pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sekretariat, pembinaan kepemudaan, pembinaan keolahragaan, destinasi dan industri pariwisata, pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tulisan sesuai kewenangan tugas dan fungsinya.

3) Rincian Tugas

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :

- a. merumuskan rencana strategik , Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Anggaran Dinas serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan lingkup dinas pemuda, olahraga dan pariwisata ;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan dibidang pemuda, olahraga dan pariwisata ;
- c. melakukan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pada lingkup dinas;
- d. mengevaluasi program dan kegiatan dan memberikan pertimbangan dibidang pemuda, olahraga dan pariwisata kepada Bupati;
- e. membina secara umum dan teknis operasional bidang pemuda, olahraga dan pariwisata sesuai kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah;
- f. mengkoordinasikan program kerja kepada Sekretaris Daerah dan membina pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan unit-unit kerja yang ada;
- g. membina serta menilai prestasi kerja bawahan sesuai prosedur dan tata kerja yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- h. mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik.

2.2.1.2 Sekretaris

1) Tugas Pokok

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional kegiatan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan berupa memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan dalam dibidang pemuda, olahraga dan pariwisata.

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. merencanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
- b. memberi petunjuk dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
- c. mengevaluasi, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala subbag dibidang pemuda, olahraga dan pariwisata; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

3) Rincian Tugas

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional rencana kegiatan tahunan sekretariat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan berupa kebijakan, petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan pengelolaan sekretariat;
- c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan sekretariat dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan permasalahan;
- d. merencanakan, menggerakkan mengkoordinasikan dan mengendalikan serta merumuskan dan mengajukan pertimbangan teknis pengelolaan sekretariat meliputi administrasi umum dan pengelolaan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;

- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
- f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan terhadap pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- g. memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya;
- j. membuat laporan kepada atasan tentang hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan lancar.

2.2.1.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Tugas Pokok

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas subbagian umum dan kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan penyusunan kebijakan teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. membimbing, pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepada staf dalam lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

3) Rincian Tugas

Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan subbagian umum dan kepegawaian dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. mengelola dan melaksanakan urusan surat menyurat;
- f. mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;
- g. mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
- h. mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
- i. mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan dan aset;
- j. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
- l. mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.2.1.2.2 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

1) Tugas Pokok

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dan Pelaporan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala subbagian perencanaan dan pelaporan mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan menyusun kebijakan teknis di sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- c. membimbing, pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepada staf dalam lingkup perencanaan dan pelaporan;
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

3) Rincian Tugas

Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dibidang perencanaan dan pelaporan;
- c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan subbagian perencanaan dan pelaporan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. mengendalikan rencana kinerja tahunan;
- e. menyiapkan bahan serta data dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas meliputi pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan kantor, dan pemeliharaan kendaraan dinas;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana kerja anggaran dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis , rencana kinerja dan laporan akuntabilitas instansi pemerintah ;
- h. menyiapkan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;

- k. memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik.

2.2.1.2.3 Sub Bagian Keuangan

1) Tugas Pokok

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas sub bagian keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian keuangan mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan menyusun kebijakan teknis di sub bagian keuangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di sub bagian keuangan;
- c. membimbing, pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepada staf dalam lingkup sub bagian keuangan;
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup sub bagian keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

3) Rincian Tugas

Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan di bidang keuangan;

- c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sub bagian keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. melaksanakan penggajian pegawai di lingkup dinas ;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan daerah lingkup dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan perbendaharaan keuangan dilingkup dinas;
- g. melaksanakan verifikasi terhadap keuangan dilingkup dinas;
- h. menyusun laporan keuangan akhir tahun dinas;
- i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
- k. memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik.
- n. membuat laporan kepada atasan tentang hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

2.2.1.3 Bidang Kepemudaan

1) Tugas Pokok

Bidang Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang kepemudaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. merencanakan penyusunan kebijakan teknis dibidang kepemudaan;
- b. memberi petunjuk dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepemudaan;
- c. mengevaluasi, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang kepemudaan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

3) Rincian Tugas

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasionalisasi rencana kerja bidang pembinaan pemuda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan rencana kegiatan dan tugas pada bawahan dibidang kepemudaan;
- c. melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan dibidang sumber daya pemuda, ilmu pengetahuan teknologi dan imam taqwa pemuda, wawasan dan kapasitas pemuda, serta kreativitas pemuda sebagai bahan analisis untuk pemberdayaan kualitas kepemudaan daerah;
- d. melakukan kegiatan, temu wicara, forum pemuda, pertunjukan kreativitas dan kegiatan pemuda lainnya dalam rangka menjalin sinergitas pemuda, pemerintah dan masyarakat;
- e. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan terhadap pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- f. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- h. Melaksanakan kegiatan peningkatan kepemimpinan, kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan melalui antara lain : sosialisasi, penyuluhan, kursus, pendidikan dan pelatihan;
- i. Menyiapkan bahan dalam melaksanakan kegiatan peningkatan infrastruktur dan kewirausahaan, melalui kegiatan antara lain : sosialisasi, penyuluhan, Pendidikan dan Latihan, Fasilitasi pendampingan dan kegiatan lain sesuai rencana yang telah ditetapkan;

- j. Menyiapkan bahan kegiatan promosi pameran kewirausahaan dari hasil karya Kreatif dalam rangka memotivasi munculnya karya-karya inovatif pemuda daerah sebagai anak bangsa;
- k. Menyiapkan bahan kegiatan pelatihan wirausahaan bagi pemuda untuk meningkatkan keterampilan bagi pengusaha muda secara mandiri;
- l. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal.

2.2.1.4 Bidang Keolahragaan

1) Tugas Pokok

Bidang Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Keolahragaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi :

- a. merencanakan penyusunan kebijakan teknis dibidang keolahragaan;
- b. memberi petunjuk dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang keolahragaan;
- c. mengevaluasi, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang keolahragaan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

3) Rincian Tugas

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.
- b. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- c. merencanakan operasionalisasi rencana kerja bidang pembinaan keolahragaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- d. mendistribusikan rencana kegiatan dan tugas pada bawahan dibidang pembinaan keolahragaan;
- e. menyiapkan bahan serta data dalam pelaksanaan kegiatan dibidang peningkatan prestasi olahraga meliputi Pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan tenaga keolahragaan;
- f. menyiapkan bahan serta data dalam pelaksanaan kegiatan dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- g. melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan dibidang pembinaan keolahragaan;
- h. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan terhadap pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;

2.2.1.4 Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

1) Tugas Pokok

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. merencanakan penyusunan kebijakan teknis dibidang destinasi dan industri pariwisata;
- b. memberi petunjuk dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang destinasi dan industri pariwisata;
- c. mengevaluasi, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan bawahan dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang destinasi dan industri pariwisata; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya;

3) Rincian Tugas

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasionalisasi rencana kerja destinasi dan industri pariwisata sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan rencana kegiatan dan tugas pada bawahan dibidang destinasi dan industri pariwisata;
- c. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang destinasi dan industri pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang destinasi dan industri pariwisata;
- e. menyelenggarakan rencana kerja dibidang destinasi dan industri pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan terhadap pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- g. mengkoordinasikan kegiatan bawahan lingkup dibidang destinasi dan industri pariwisata agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. melaksanakan pengumpulan data dan mengelola data berbasis teknologi informasi sebagai bahan pengembangan kawasan pariwisata, pengembangan industri pariwisata, dan pengembangan daya tarik wisata.
- i. melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang destinasi dan industri pariwisata;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja bidang destinasi dan industri pariwisata sesuai rencana program yang telah ditetapkan;

2.2.1.5 Bidang Pemasaran, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1) Tugas Pokok

Bidang Pemasaran, Sumber Daya Pariwisata dan EKRAF dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pemasaran, Sumber Daya Pariwisata dan EKRAF mempunyai fungsi :

- a. merencanakan penyusunan kebijakan teknis dibidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF;
- b. memberi petunjuk dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

3) Rincian Tugas

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasionalisasi rencana kerja dibidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan rencana kegiatan dan tugas pada bawahan dibidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF;
- c. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan bidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF;
- e. menyelenggarakan rencana kerja dibidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan terhadap pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- g. mengkoordinasikan kegiatan bawahan lingkup bidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF;
- i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF;
- j. melaksanakan pengumpulan data dan mengelola data berbasis teknologi informasi sebagai bahan dibidang promosi dan analisis pasar;
- k. melaksanakan pengumpulan data dan mengelola data berbasis teknologi informasi sebagai bahan dibidang EKRAF dan pengembangan SDM kepariwisataan;

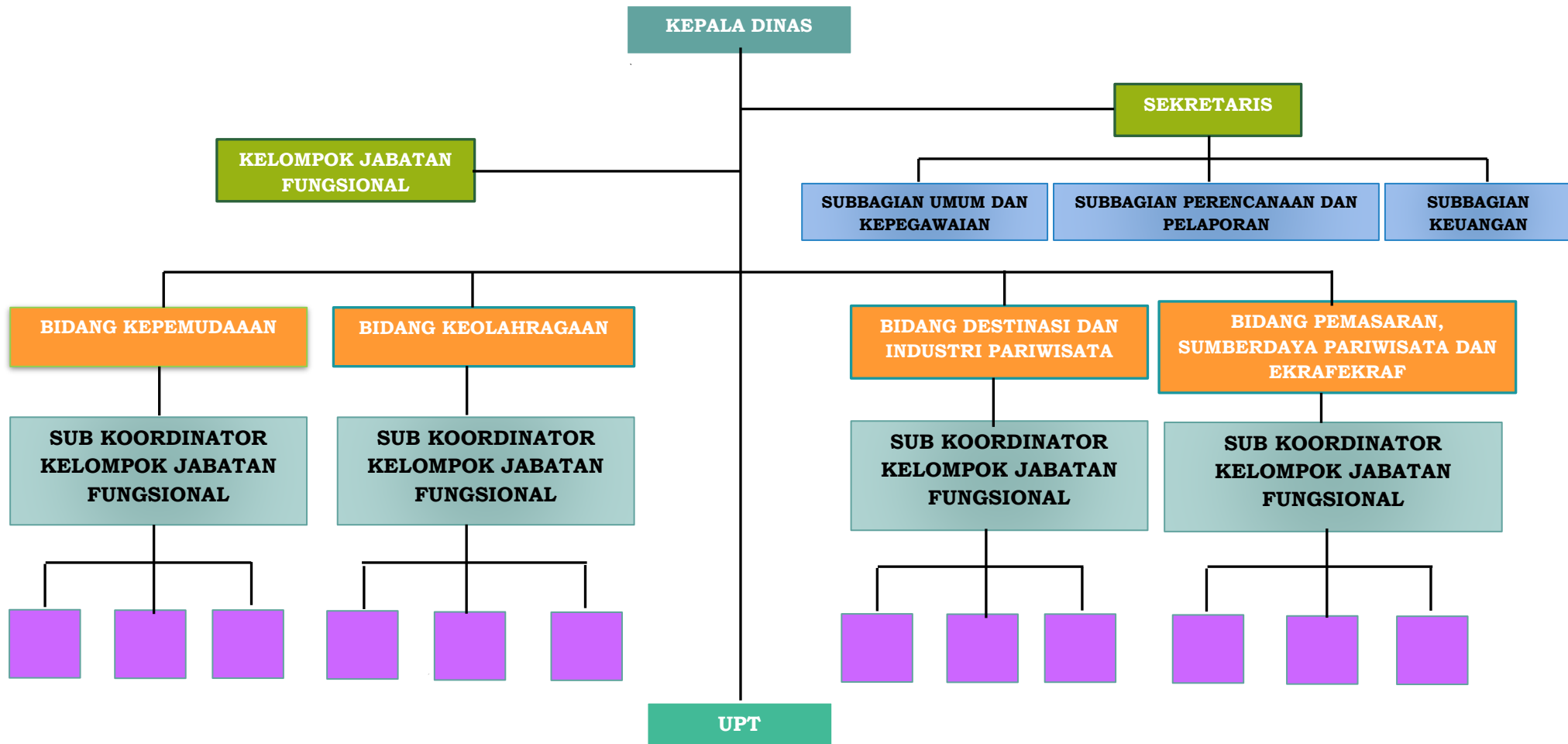
1. melaksanakan pengembangan kelembagaan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

2.2.1.6 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**



2.2.2 Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui *review* capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah melakukan evaluasi yang berasal dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan data realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan APBD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo pada Tahun Anggaran yang bersangkutan. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan kajian terhadap capaian pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

A. Indikator sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo tahun 2025-2029 maka tujuan dan sasaran yang terjabarkan pada IKU Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo

**Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan pengelolaan keuangan PD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100%	
2	Meningkatnya kewirausahaan pemuda	Jumlah wirausaha pemuda baru	3.500	735	0,22%	
4	Meningkatnya pembinaan olahraga	Jumlah atlet berprestasi Nasional dan Internasional	5	5	100%	
5	Meningkatnya kualitas destinasi dan pemasaran pariwisata	Rata-rata tinggal wisatawan	0,8 Hari	0,8 Hari	100%	

2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo

**Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo**

No	Indikator	Target	Realisasi	Ket
		2024	2024	
1	2	3	4	5
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	47%	34,87 %	
2	Persentase Wirausaha Muda	23%	55,83 %	
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	100%	100%	
4	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	100%	100%	
5	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	100%	100%	
6	Jumlah Prestasi Olahraga	17 Cabor	2 Cabor	
7	Lama Kunjungan Wisata	0,8 Hari	0,8 Hari	
8	Kunjungan Wisata	36.06%	102%	
9	PAD Sektor Pariwisata	0,09%	0.050%	
10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	2,40%	0,40 %	

3. Capaian SDGs/TPB Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo

Kode Indikator	Target.Indikator	Sumber Data	Satuan	Target	Realiasi	Ket
				2024	2024	
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI						
Tujuan SDGs 8	: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua					
Target 8.9	: Pada tahun 2030 , menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk local					
Target 8.9.1 *	: Proporsi dan laju kontribusi pariwisata terhadap PDB					
8.9.1*	Proporsi dan laju kontribusi pariwisata terhadap PDB	BPS	%	0,40%	1,00%	
8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Disporapar	Orang	2.300	2.805	
8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Disporapar	Orang	350.000	352.765	
8.9.1 ©	Jumlah devisa sektor pariwisata	Disporapar	USD	253.000	308.550	

Berikut gambaran lebih rinci terhadap capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kunci (IKK) dimulai dari target tahun 2025 s/d tahun 2029, realisasi tahun 2024 s/d tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	0	v	0	36%	37%	38%	39%	40%	35.89%	36%	37%	38%	Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
2	Persentase Wirausaha Muda	0	v	0	55,88%	56,00%	56,20%	56,50%	56,70%	100%	100%	56,00%	56,20%	Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	0	v	0	8,90%	12,10%	15,60%	18,56%	21,81%	100%	8,90%	12,10%	15,60%	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
4	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	0	v	0	6,81%	10,35%	14,17%	19,11%	23,33%	100%	6,81%	10,35%	14,17%	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
5	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	0	v	0	8,85%	12,22%	15,10%	18,11%	20,50%	100%	8,85%	12,22%	15,10%	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
6	Jumlah Prestasi Olahraga	0	v	0	30	32	35	38	41	100%	30	32	35	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
7	Lama Kunjungan Wisata	0	v	0	372,500	403,300	428,300	453,700	478,900	0,8 Hari	1 hari	403,300	428,300	Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

8	Kunjungan Wisata	0	√	0	1 Hari	1,1 Hari	1,1 Hari	1,2 Hari	1,2 Hari	355,570	372,500	1,1 Hari	1,1 Hari	Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa
9	PAD Sektor Pariwisata	0	√	0	0,60%	0,62%	0,64%	0,66%	0,68%	0.050%	0.06%	0.62%	0,64%	Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa
10	Pengembangan Pariwisata	0	0	0	62	65	65	68	68	65	62	65	65	Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa
11	Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	0	0	0	80,000	81,000	82,000	83,000	84,000	355,570	80,000	81,000	82,000	Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa
12	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	0	0	0	255	260	265	270	275	251	255	260	265	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata memiliki peran penting dalam mengembangkan sektor pemuda, olahraga, dan pariwisata di suatu daerah. Kinerja pelayanan dinas ini mencerminkan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Data tersebut akan memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja pelayanan dinas selama periode tertentu, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Selama 2 Tahun Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata telah berhasil mencapai beberapa pencapaian penting dalam berbagai bidang:

1. Pengembangan Pemuda
2. Pengembangan Olahraga
3. Pengembangan Pariwisata

Secara keseluruhan, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata telah mencapai banyak pencapaian positif dalam periode 2 tahun ini. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, komitmen kuat dan strategi yang tepat dapat membantu dinas untuk terus meningkatkan kinerjanya. Dengan langkah-langkah perbaikan yang sesuai, diharapkan dinas dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap pengembangan pemuda, olahraga, dan pariwisata di daerah.

2.2.3 Pengolahan Data dan Informasi

Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data dan Informasi memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi di kumpulkan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan rusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Data dan informasi berdasarkan indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Tabel Data Informasi. Data dan informasi Indikator Kinerja yang merupakan capaian kinerja pada penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo berupa:

1. Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals.

Tabel 2.2.3.1
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

a. Urusan Pemuda dan Olahraga

1. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif

NO	URAIAN	2022	2023	2024
1	Jumlah Organisasi pemuda yang aktif	47	68	70
2	Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda	195	195	195
3	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	24,10 %	34,87 %	35,89 %

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa sudah ada peningkatan pada kegiatan Organisasi Kepemudaan. Hal ini terjadi karena adanya dukungan dan bantuan dari Pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata pada Bidang Kepemudaan dengan melakukan pendataan tentang organisasi yang masih aktif dan organisasi yang tidak aktif dengan melihat SK kepengurusan organisasi tersebut dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kesbangpol jumlah keseluruhan organisasi pemuda yang terdaftar mayoritas dari komunitas/club dan organisasi lokal.

Setiap tahunnya, Tingkat partisipasi organisasi pemuda terus menunjukkan tren peningkatan, meskipun dalam persentase yang tidak terlalu besar. Hal ini mencerminkan semangat dan kesadaran generasi muda yang semakin tumbuh terhadap pentingnya berorganisasi dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan social, Pendidikan serta pengembangan diri. Walaupun tantangan tetap ada, keberlanjutan tren positif ini menjadi bukti bahwa organisasi pemuda masih memiliki daya Tarik dan relevansi dalam membentuk karakter serta kepemimpinan generasi penerus.

2. Persentase Wirausaha Muda

NO	URAIAN	2021	2022	2023
1	Jumlah Wirausaha Muda	1.036	728	750
2	Jumlah Seluruh Wirausaha	3.008	1.304	1.342
3	Persentase Wirausaha muda	34,44%	55,83%	55,88%

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa pada Tahun 2022 Jumlah Wirausaha Muda sebanyak 1.036 orang dengan persentase 34,44% dari total wirausaha yang ada. Namun, pada Tahun 2023 terjadi penurunan Jumlah Wirausaha Muda menjadi 728 orang, meskipun secara persentase mengalami peningkatan signifikan menjadi 55,83%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, Dimana jumlah wirausaha muda meningkat menjadi 750 orang, dengan persentase yang juga naik tipis menjadi 55,88%.

Meskipun jumlah wirausaha muda sempat menurun dari tahun 2022 ke 2023, persentase keterlibatan mereka dalam dunia usaha menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, menandakan bahwa proporsi wirausaha muda semakin dominan dalam ekosistem bisnis. Hal ini bisa menjadi indikator meningkatnya minat dan keterlibatan generasi muda dalam dunia wirausaha.

3. Cakupan Pembinaan Olahraga

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	25	26	28	42
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	25	26	28	42
3	Cakupan pembinaan olahraga	100%	100%	100%	100%

Cabang Olahraga yang dibina dibawah naungan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kab. Wajo yang bekerja sama dengan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo

4. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelatih bersertifikat	25	25	26	26
2	Jumlah seluruh pelatih	25	25	26	26
3	Cakupan Pelatih yang bersertifikat	100%	100%	100%	100%

Dari 24 pelatih yang bersertifikat, 12 diantaranya berlisensi Nasional, masing-masing dengan rincian : 5 dari cabang olahraga sepak bola, 2 pelatih dari cabang olahraga volley, 1 dari cabang olahraga senam.

5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah atlit pelajar yang dibina	670	699	730	760
2	Jumlah seluruh atlit pelajar	670	699	730	760
3	Cakupan pembinaan atlet muda	100%	100%	100%	100%

6. Jumlah Atlet berprestasi

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuaran tingkat Nasional dan Internasional dalam satu tahun	26	28	29	37

7. Jumlah Prestasi Olahraga

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun	6	7	2	9

Prestasi olahraga adalah cerminan dari kemampuan, ketekunan dan dedikasi para atlet dalam meraih kemenangan. Jumlah prestasi olahraga mencakup berbagai bentuk penghargaan seperti emas, perak dan perunggu.

B. PARIWISATA

1. Kunjungan Wisata

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota	29.222	39.392	347.416	355.570
2	Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota	29.222	30.000	35.000	350.000
3	Kunjungan wisata	100%	131%	992%	102 %

Pada tabel 2.1, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisata hanya berdasar pada 3 (tiga) objek pengambilan kunjungan, selanjutnya bertambah menjadi 6 (enam) daya tarik wisata pada tahun 2022. Pada tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan mengalami kenaikan yang signifikan diakibatkan adanya tambahan daya tarik wisata yang menjadi objek perhitungan yakni 13 (tiga belas) daya tarik wisata. Selanjutnya pada tahun 2024, seiring bertambahnya daya tarik wisata baru dan tingginya keinginan masyarakat melakukan wisata maka jumlah objek perhitungan menjadi 16 (enam belas) daya tarik wisata, baik yang dikelola pemerintah daerah, desa dan pihak swasta/Yayasan.

2. Lama Kunjungan Wisata

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata Lama Kunjungan wisata dalam satu tahun	0,2 Hari	0,4 Hari	0,6 Hari	0,8 Hari

Pada tabel 2.2, Adapun lama kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara setiap tahun terus mengalami peningkatan secara periodik pasca pandemic Covid-19. Hal ini menjadi bukti sektor industri pariwisata Kab. Wajo telah siap bersaing dan mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi secara nasional dan global. Tentu menjadi perhatian bagi pemerintah dan pelaku pariwisata untuk tetap meningkatkan/mempertahankan daya tarik wisata, perbaikan fasilitas dan infrastruktur penunjang destinasi di Kab. Wajo.

3. PAD Sektor Pariwisata

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024
1	PAD Sektor Pariwisata	84.146.000	106.055.000	41.525.000	95.877.000
2	Total PAD	132.322.535.540	162.855.347.697	186.338.116.333	189.459.177.338.16
3	PAD Sektor Pariwisata	0,064%	0,065%	0,022%	0,050%

Pada Tabel 2.3, PAD Sektor Pariwisata empat tahun terakhir mengalami fluktuatif, hal ini disebabkan adanya perubahan pasar pariwisata meliputi tren pariwisata khususnya pada generasi milenial dan generasi Z. Pada tahun 2021 dan 2022 persentase PAD pariwisata terhadap total PAD Kab. Wajo ± 0.06 %, tapi pada tahun 2023 turun menjadi 0.02 % terhadap total PAD. Hal ini di akibatkan oleh adanya revitalisasi Saoraja Latenribali yang memakan waktu ± 8 (delapan) bulan dan adanya pembenahan sarana venue olahraga di Kawasan Wisata Atakkae sehingga PAD sektor pariwisata hanya terkumpul Rp. 41.525.000,-. Pada tahun 2024 sudah terjadi peningkatan yang cukup

signifikan yang mencapai 0.05 % kontribusinya terhadap total PAD sektor pariwisata di Kab. Wajo. Hal ini disebabkan tingginya animo masyarakat untuk melakukan kunjungan ke Kawasan Wisata Atakkae pasca revitalisasi Saoraja Latenri Bali dan berfungsinya sarana dan prasarana lainnya dalam kawasan wisata tersebut. Pertambahan PAD pada tahun 2024 sesungguhnya belum dapat memenuhi target PAD yang ditentukan sebesar Rp. 135.000.000,-, hal ini disebabkan Kawasan Wisata Atakkae selaku penyumbang PAD pariwisata terbesar pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata baru berjalan normal pemungutan PAD di triwulan kedua tahun 2024.

4. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata	79,85	91,76	99,52	112,50
2	Jumlah PDRB	22.319,74	24.352,78	24.588,57	25.954,22
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,36%	0,38%	0,40%	1,00%

Tabel 2.2.3.2
Capaian Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Uraian	2022	2023	2024
Tidak ada target pencapaian SPM				

Tabel 2.2.3.3
Capaian Tujuan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals
(TPB/SDGs)

NO INDIKATOR	INDIKATOR	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
8.9.1*	Proporsi dan laju kontribusi pariwisata terhadap PDB	0,36%	0,38%	0,40%	1,00%
8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan mancanegara	0	513	2.011	2.805
8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	29.222	38.879	345.405	352.765
8.9.1 ©	Jumlah devisa sektor pariwisata	0	56.430	221.210	308.550

2.2.4 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Munculnya Isu dan masalah penting yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya dan hukum khususnya dalam wilayah Sulawesi Selatan, tidak terlepas dari keterlibatan dan keterkaitannya dengan masalah Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Oleh karena itu perlu penanganan secara holistik dan terintegrasi dari berbagai sektor kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

Permasalahan adalah kesenjangan antara harapan kinerja dengan capaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi. Kesenjangan tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan faktor kunci keberhasilan ataupun faktor kunci ketidakberhasilan dalam pencapaiannya. Berdasarkan pengertian demikian maka permasalahan dalam tugas dan fungsi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

a. Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Masih kurangnya kinerja kader pemuda dalam pembangunan
- 2) Masih kurangnya wirausaha dalam usia muda
- 3) Kurang optimalnya pembinaan olahraga
- 4) Kurangnya pelatih yang bersertifikasi
- 5) Rendahnya pembinaan atlet muda
- 6) Minimnya prestasi atlet
- 7) Minimnya prestasi dalam olahraga.

Pemuda dalam dinamika dan di alektika sejarah Indonesia selalu memiliki peran dan posisi yang Khas. Hampir disetiap babak perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pemuda selalu mengambil perannya yang signifikan. Momentum Sejarah sejak era Pra Kemerdekaan, Kemerdekaan dan pasca Kemerdekaan, menunjukkan dengan gamblang tentang peranan pemuda tersebut. Pada era reformasi sekarang ini, dunia kepemudaan berkembang dinamis, tidak saja dari aspek gerakannya tetapi juga Pada jumlah Lembaganya. Perkembangan organisasi pemuda semakin meningkat dengan beragam

tujuan dan latar belakang perkembangannya antara lain berlatar politik, ekonomi, sosial dan budaya. Keberadaannya pun beragam, ada yang berbentuk OKP di bidang Kepemudaan.

Dalam rangka pemberdayaan Kepemudaan, pemerintah berkewajiban mendinamisasikan dunia kepemudaan dan menjaga eksistensi lembaga kepemudaan agar mampu menjaga kinerjanya dan bersama pemerintah membangun dunia kepemudaan yang lebih maju dan mandiri.

Ada 3 tugas utama pemerintah dalam peran serta pemuda di antaranya yaitu :

- Mengakomodasi seluruh kepentingan dan aspirasi para pemuda.
- Memfasilitasi secara terbatas baik teknis, manajemen, maupun dana dalam rangka mendinamisasikan dunia kepemudaan dan,
- Memberikan pengakuan akan eksistensi lembaga – lembaga kepemudaan.

Berbagai organisasi pemuda yang terhimpun dalam wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) baik di Propinsi maupun di kabupaten/kota berjumlah 28 organisasi kepemudaan. Namun dalam pelaksanaannya kegiatan kepemudaan kurang terkoordinir sehingga respons institusi kepemudaan terhadap perkembangan ruang lingkup kepemudaan.

Masyarakat sepenuhnya sangatlah mengerti tentang arti pentingnya Olahraga untuk tetap menjaga kesehatan dan kebugaran kita sehari-hari. Budaya Olahraga masih tergolong rendah, hal ini tercermin pada rendahnya kesempatan untuk beraktifitas olahraga karena semakin berkurangnya lapangan dan fasilitas untuk berolahraga, lemahnya koordinasi kemitraan lintas lembaga dalam hal penyediaan fasilitas keolahragaan. Selain itu kesadaran masyarakat akan kesehatan dengan tetap berolahraga masih sangat rendah.

1) Rendahnya Minat dan Budaya Berolahraga.

Dalam rangka menumbuhkan budaya olahraga untuk meningkatkan kemajuan pembangunan olahraga, maka budaya di masyarakat perlu ditumbuhkan. Beberapa permasalahan yang harus diatasi adalah:

- 2) Masih terkotak-kotaknya sistem dan manajemen keolahragaan dan belum terpadunya semua unsur masyarakat.
- 3) Lemahnya sumber daya keolahragaan (pelatih, wasit, instruktur, manajemen).
- 4) Sarana dan prasarana tidak memenuhi standar latihan / standar nasional / internasional.
- 5) Belum adanya sistem informasi keolahragaan yang mutakhir dan dikelola secara profesional serta jaringan kerja sama yang baik dalam pembinaan dan pengembangan olahraga antar daerah, antar instansi, antar perkumpulan/organisasi olahraga dan lain – lain.
- 6) Belum terpolanya Pemassalan dan Pembibitan Olahraga.

- 7) Pola yang digunakan terhadap pemassalan dan pembibitan olahraga dalam Olahraga Pendidikan belum berdampak secara signifikan terhadap penyiapan dan regenerasi atlet seperti Pelaksanaan pada Pekan Olahraga ditingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah menengah Atas yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali. Pekan Olahraga tersebut dilaksanakan untuk memberikan pelatihan dan pengajaran pada siswasiswa untuk melatih kemampuan pribadi masing-masing. Untuk pemassalan dan pembibitan olahraga prestasi di tingkat daerah belum menjadi media bagi rekrutmen atlet khususnya di Sulawesi Selatan. Begitu juga pola-pola pembibitan dan pembinaan atlet belum juga sepenuhnya maksimal.
- 8) Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga. Fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan olahraga masih sangat terbatas dari apa yang diharapkan dan sangat berpengaruh pada peningkatan dan perkembangan atlet, pelatih dan pembina olahraga sehingga segala upaya pemassalan dan pembibitan serta pencapaian prestasi kurang berjalan dengan baik. Demikian pula pembangunan kualitas pemuda sangat diperlukan sarana dan prasarana kepemudaan yang berkualitas dan tersebar merata sesuai dengan kebutuhan di daerah.

b. Pariwisata

- 1) Daya tarik wisata di kabupaten wajo kurang dikembangkan
- 2) Promosi pariwisata ke luar daerah kurang dimaksimalkan
- 3) Kurang optimalnya pemasaran wisata
- 4) Kurang berkualitasnya sarana dan prasarana obyek wisata
- 5) Rendahnya dukungan pihak swasta
- 6) SDM pelaku pariwisata masih rendah

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas maka ditetapkan factor penentu keberhasilan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan objek daya tarik wisata serta sarana dan prasarana pariwisata.
 - 2) Pengelolaan dan kualitas pelayanan
 - 3) Pemasaran atau promosi pariwisata
 - 4) Partisipasi masyarakat dan kerjasama dengan mitra usaha
- Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
- 1) Kurangnya sarana dan prasarana wisata sebagai pendukung kunjungan wisata
 - 2) Kurangnya atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan
 - 3) Kurangnya aksesibilitas dari Makassar ke Kabupaten Wajo melalui perjalanan jauh lewat darat Maros, Bone dan Soppeng.
 - 4) Kurangnya tenaga guide (pemandu wisata) dalam daerah.
 - 5) Tidak adanya dana untuk pemeliharaan pelestarian cagar budaya sebagai pendukung objek wisata.
 - 6) Kurangnya promosi baik dalam maupun luar negeri.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas maka ditetapkan factor penentu keberhasilan sebagai berikut:

- 1) Adanya objek dan daya tarik wisata seperti danau tempe dan sutera sebagai ikon wisata nasional
- 2) Adanya factor keamanan pada lingkungan daerah wisata

Isu penting tersebut dapat dilihat pada RENSTRA terkait isu strategis dan disesuaikan dengan bidang urusan, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Tehnik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah				
			Global	Nasional	Regional					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
Kawasan Wisata Atakkae, Kawasan Wisata Rumah Terapung Danau Tempe, Kawasan Wisata Kolam Renang Kalola, Lapangan Tennis dan Stadion Andi Ninong	Masih kurangnya kinerja kader pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif, dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Berkaitan dengan isu menurunnya kontribusi sektor unggulan, pendapatan daerah dan dukungan lembaga keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Persaingan global menuntut kreativitas dan daya saing pemuda	Kurangnya program kewirausahaan pemuda skala nasional	Peran pemuda dalam inovasi daerah masih rendah	Optimaliasi peran pemuda dalam menciptakan pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan				
	Masih kurangnya wirausaha dalam usia muda									
	Minimnya prestasi keolahragaan baik ditingkat regional maupun nasional		Tren global sport science dan pembinaan atlet	Rendahnya prestasi olahraga nasional di beberapa cabang olahraga	Keterbatasan event kompetitif lokal	Peningkatan pembinaan atlet berprestasi				
	Belum optimalnya pembinaan olahraga.		Standar global infrastruktur ramah lingkungan	Pembangunan infrastruktur olahraga belum merata	Fasilitas olahraga tidak memadai	Peningkatan sarana prasarana olahraga guna kemajuan prestasi olahraga				
	Kurangnya sarana dan prasarana olahraga									
	Destinasi dan industri pariwisata belum berkembang secara maksimal						Pariwisata berkelanjutan (ecotourism, heritage)	Fokus nasional pada pariwisata prioritas	Belum optimalnya promosi destinasi lokal	Pengembangan destinasi wisata dan daya tarik objek wisata
	SDM pelaku ekonomi kreatif yang masih terbatas						Peran ekonomi kreatif dalam pemulihan global	Penguatan sektor ekonomi kreatif dalam RPJMN	Keterbatasan pelatihan dan akses pasar	Pelaksanaan pelatihan dan penyediaan sentra ekonomi kreatif

2.3 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan rancangan awal RENJA Tahun 2026, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo turut mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi. Permasalahan yang harus segera diselesaikan terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan antara lain masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap usulan perencanaan yang disampaikan ke tingkat kota, masih terbatasnya ketersediaan data yang akurat serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan dapat diselesaikan melalui pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel dengan program prioritas perencanaan pembangunan daerah.

Review terhadap rancangan awal RENJA dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RENJA dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program / kegiatan yang tidak diperlukan. Berdasarkan hasil review terdapat perbedaan antara rancangan awal RENJA dengan hasil analisis kebutuhan yaitu berdasarkan analisis kebutuhan bahwa besaran anggaran setelah dianalisis dengan kebutuhan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku serta analisis standar harga. Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) tahun 2026 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo merencanakan untuk melaksanakan 7 Program, 18 Kegiatan dan 70 Sub Kegiatan.

Tabel 2.5
Reviu terhadap Rancangan Awal RENJA Tahun 2026
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Cacatan Penting
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rata-rata realisasi output kegiatan Perangkat Daerah	100%	4,206,950,631	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rata-rata realisasi output kegiatan Perangkat Daerah	100%	4,206,950,631	
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Disporapar</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>2,500,000</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Disporapar</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>2,500,000</i>	
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>2,000,000</i>			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>2,000,000</i>	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2,000,000	
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	10,000,000			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	10,000,000	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	10,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	10,000,000	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Laporan	2,000,000			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Laporan	2,000,000	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Laporan	2,000,000			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Laporan	2,000,000	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 data	2,000,000			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 data	2,000,000	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Berita Acara	4,000,000			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Berita Acara	4,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,000,000	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 data	2,000,000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 data	2,000,000	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	4,000,000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	4,000,000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disporapar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	3,769,850,631	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disporapar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	3,769,850,631	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,500,000			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,500,000	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1,500,000			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1,500,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	3,769,850,631	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	3,769,850,631	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1,500,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disporapar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	10,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disporapar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	10,000,000	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3,000,000			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3,000,000	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3,000,000			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3,000,000	

			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	10,000,000			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	10,000,000	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	10,000,000			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	10,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	10,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	10,000,000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3,000,000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	10,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	10,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	10,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	10,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disporapar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disporapar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1,000,000	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1,000,000			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1,000,000	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1,000,000			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1,000,000	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1,000,000			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1,000,000	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	1,000,000			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	1,000,000	

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	56,500,000			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	56,500,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	1,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	1,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	56,500,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	56,500,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disporapar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	5,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disporapar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	5,000,000	
			Tersedianya Mebel	1 Unit	10,000,000			Tersedianya Mebel	1 Unit	10,000,000	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11,000,000			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11,000,000	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15,000,000			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15,000,000	

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	5,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	5,000,000	
	Pengadaan Mebel		Tersedianya Mebel	1 Unit	10,000,000	Pengadaan Mebel		Tersedianya Mebel	1 Unit	10,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disporapar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disporapar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	237,100,000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	237,100,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	237,100,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	237,100,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disporapar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	6 Unit	15,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disporapar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	6 Unit	15,000,000	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	3,000,000			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	3,000,000	

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3,000,000			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3,000,000	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/rehab	1 Unit	3,000,000			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/rehab	1 Unit	3,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	6 Unit	15,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	6 Unit	15,000,000	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	3,000,000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	3,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3,000,000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/rehab	1 Unit	3,000,000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/rehab	1 Unit	3,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Rasio wirasauha pemuda	100%	31,847,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Rasio wirasauha pemuda	100%	31,847,000	
	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Wirasaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10 Orang	11,847,000	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Wirasaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10 Orang	11,847,000	

			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	5 Orang	5,000,000			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	5 Orang	5,000,000	
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	5,000,000			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	5,000,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota		Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10 Orang	11,847,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota		Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10 Orang	11,847,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	5 Orang	5,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	5 Orang	5,000,000	
	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat		Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	5,000,000	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat		Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	5,000,000	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Wajo	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	5,000,000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Wajo	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	5,000,000	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	10 Orang	5,000,000			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	10 Orang	5,000,000	
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	5,000,000	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	5,000,000	

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	10 Orang	5,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	10 Orang	5,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Persentase Atlet yang masuk Pelatnas	100%	3,436,673,879	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Persentase Atlet yang masuk Pelatnas	100%	3,436,673,879	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	6 Unit	2,001,673,879	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	6 Unit	2,001,673,879	
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	6 Unit	2,001,673,879	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	6 Unit	2,001,673,879	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 kejuaraan	500,000,000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 kejuaraan	500,000,000	
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	10 Orang	100,000,000			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	10 Orang	100,000,000	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	500,000,000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	500,000,000	

	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	10 Orang	100,000,000	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	10 Orang	100,000,000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Wajo	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		50,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Wajo	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		50,000,000	
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga		100,000,000			Jumlah penerima Penghargaan olahraga		100,000,000	
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		100,000,000			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		100,000,000	
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota		25,000,000			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota		25,000,000	
	Seleksi Atlet Daerah		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	15 Orang	50,000,000	Seleksi Atlet Daerah		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	15 Orang	50,000,000	
	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga		Jumlah penerima Penghargaan olahraga	5 Orang	100,000,000	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga		Jumlah penerima Penghargaan olahraga	5 Orang	100,000,000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota		Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	15 Orang	100,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota		Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	15 Orang	100,000,000	
	Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota		Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	25,000,000	Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota		Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	25,000,000	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kab. Wajo	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota		400,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kab. Wajo	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota		400,000,000	

	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400,000,000	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400,000,000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kab. Wajo	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		35,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kab. Wajo	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		35,000,000	
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		50,000,000			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		50,000,000	
			Jumlah Prasarana dan Sarana olahraga rekreasi kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		25,000,000			Jumlah Prasarana dan Sarana olahraga rekreasi kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		25,000,000	
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi		50,000,000			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi		50,000,000	
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	35,000,000	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	35,000,000	
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Laporan	50,000,000	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Laporan	50,000,000	
	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan		Jumlah Prasarana dan Sarana olahraga rekreasi kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Unit	25,000,000	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan		Jumlah Prasarana dan Sarana olahraga rekreasi kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Unit	25,000,000	

	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional		Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	50,000,000	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional		Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	50,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Tingkat partisipasi masyarakat dalam Kepramukaan	100%	125,500,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Tingkat partisipasi masyarakat dalam Kepramukaan	100%	125,500,000	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		100,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		100,000,000	
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		5,500,000			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		5,500,000	
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		5,000,000			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		5,000,000	
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan		15,000,000			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan		15,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	100,000,000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	100,000,000	
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	5 Oarng	5,500,000	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	5 Oarng	5,500,000	
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	5,000,000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	5,000,000	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan		Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	15,000,000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan		Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	15,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	100%	7,766,854,000	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	100%	7,766,854,000	

	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		300,000,000	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		300,000,000	
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		100,000,000			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		100,000,000	
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	50 Lokasi	300,000,000	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	50 Lokasi	300,000,000	
	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		50,000,000	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		50,000,000	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		20,000,000			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		20,000,000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		50,000,000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		50,000,000	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		20,000,000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		20,000,000	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		350,000,000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		350,000,000	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		100,000,000			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		100,000,000	

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		6,736,854,000			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		6,736,854,000	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		30,000,000			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		30,000,000	
	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 Lokasi	350,000,000	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 Lokasi	350,000,000	
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	
	Pengadaan/Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	6,736,854,000	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	6,736,854,000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	30,000,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	30,000,000	
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan		50,000,000	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan		50,000,000	
			Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya		30,000,000			Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya		30,000,000	
	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko		Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	10 Pelaku Usaha	50,000,000	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko		Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	10 Pelaku Usaha	50,000,000	

	Pelaksanaan Fasilitas Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah		Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitas Standardisasi dan Sertifikasi Usahnya	10 Badan Usaha	30,000,000	Pelaksanaan Fasilitas Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah		Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitas Standardisasi dan Sertifikasi Usahnya	10 Badan Usaha	30,000,000	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	100%	309,768,300	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	100%	309,768,300	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		50,000,000	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		50,000,000	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		209,768,300			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		209,768,300	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		50,000,000			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		50,000,000	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	50,000,000	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	50,000,000	
	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	209,768,300	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	209,768,300	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	50,000,000	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	50,000,000	

	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	100%	360,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	100%	360,000,000	
	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia		360,000,000	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia		360,000,000	
	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif		Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia		360,000,000	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif		Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia		360,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	175,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	175,000,000	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Wajo	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		100,000,000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Wajo	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		100,000,000	
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata		50,000,000			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata		50,000,000	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		25,000,000			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		25,000,000	

	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	100,000,000	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	100,000,000	
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	50 Orang	50,000,000	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	50 Orang	50,000,000	
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	25,000,000.00	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	25,000,000.00	
	Jumlah				16,412,593,810	Jumlah				16,412,593,810	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo tahun 2025 disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari Kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi, Pokok-Pokok Pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrembang Desa maupun Kecamatan. Rincian usulan kegiatan dimaksud disajikan pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Wajo

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
	<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kecamatan Tempe, Kab. Wajo	Perlunya di laksanakan bimtek untuk peningkatan kapasitas pemuda	1 Kegiatan	H.RISMAN LUKMAN.,SP., M.Si
		Tersebar di Kec. Belawa, Kec. Maniangpajo dan Kec. Gilireng, Kab. Wajo	Pengembangan Bakat Kepemudaan tersebar di Kec. Belawa, Kec. Maniangpajo dan Kec. Gilireng	1 Kegiatan	ARGA PRASETYA ASHAR, SE
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>				
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Lapangan Tomodi Kecamatan Tempe, Kab. Wajo	Pengadaan, pembangunan sarana prasarana olahraga dalam hal ini Perbaikan Tiang Gawang, Penerangan dan Pembangunan wc di Lapangan Tomodi	1 Kegiatan	Andi Bayuni Marzuki, ST
		tersebar di Kecamatan Sabbangparu, Kab. Wajo	Diminta adanya dukungan program dan kegiatan pemeliharaan dan pembangunan sarana olah raga tersebar di Kecamatan Sabbangparu	1 Kegiatan	Feri Saputra
		Kecamatan Tempe, Kab. Wajo	Banyaknya sarana olahraga yang tidak tersedia sehingga diperlukan Pengadaan seperti Ring Kickboxing dan sarana lainnya di Kecamatan Tempe	1 Kegiatan	H.RISMAN LUKMAN.,SP., M.Si

		belakang tiang gawang lapangan Benteng Kecamatan Pitumpanua, Kab. Wajo	Pembangunan rabat beton untuk sport area belakang tiang gawang lapangan Benteng Kecamatan Pitumpanua panjang ± 100 meter dan lebar ± 3 Meter untuk melancarkan aktivitas dan ekonomi masyarakat	1 Kegiatan	MUSTARIN, SE
		Lapangan Sepak Bola Paria Kecamatan Majauleng, Kab. Wajo	Masih rendahnya kualitas lapangan sepak bola dalam rangka meningkatkan upaya pengembangan keolahragaan sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana olahraga yang memadai yang dapat menunjang kegiatan olahraga serta dapat mengembangkan potensi-potensi di bidang olahraga	1 Kegiatan	SULHAN
		Kecamatan Tempe, Kab. Wajo	Kondisi lapangan saat ini perlu di kembalikan fungsinya sehingga diperlukan pembangunan lapangan awakalukku	1 Kegiatan	H.RISMAN LUKMAN.,SP., M.Si
		lapangan Desa Lautang Kecamatan Belawa, Kab. Wajo	Dibutuhkannya pembangunan drainase pada lapangan Desa Lautang Kecamatan Belawa, karena lapangan Desa ini aktif digunakan masyarakat utamanya kelompok pemuda untuk berbagai event. Sedangkan pada lapangan sering mengalami banjir (luapan air hujan) sehingga masyarakat terkendala.	1 Kegiatan	ANDI TRI SAKTI
		Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Kab. Wajo	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Balap Motor Porprov di Kecamatan Tempe	1 Kegiatan	TAQWA GAFFAR
		Sirkuit Atakkae Kel. Atakkae Kec. Tempe , Kab. Wajo	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sirkuit Atakkae Kel. Atakkae Kec. Tempe	1 Kegiatan	TAQWA GAFFAR
		Kecamatan Tempe, Kab. Wajo	Pengembangan sarana olahraga sepak bola sehingga perlu dilakukan pembinaan bulutangkis BPSI & Peratsi	1 Kegiatan	FERI SURACHMAT, S.E.,M.A.P
		tersebar di Kecamatan Pammana., Kab. Wajo	Diminta adanya dukungan program dan kegiatan pemeliharaan dan pembangunan sarana olah raga tersebar di Kecamatan Pammana.	1 Kegiatan	Feri Saputra
		Desa Benteng Kecamatan Penrang, Kab. Wajo	Masih rendahnya kualitas olahraga dalam rangka meningkatkan upaya pengembangan keolahragaan sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana olahraga yang memadai yang dapat menunjang kegiatan olahraga serta dapat mengembangkan potensi-potensi di bidang olahraga	1 Kegiatan	DIRGA DWI PUTRA ASHAR, SP
		Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging, Kab. Wajo	Masih rendahnya kualitas olahraga dalam rangka meningkatkan upaya pengembangan keolahragaan sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana olahraga yang memadai yang dapat menunjang kegiatan olahraga serta dapat mengembangkan potensi-potensi di bidang olahraga	1 Kegiatan	DIRGA DWI PUTRA ASHAR, SP

		Desa Inalipue Kecamatan Tanasitolo, Kab. Wajo	Peningkatan sarana dan pra sarana olahraga Desa Inalipue Kecamatan Tanasitolo	1 Kegiatan	HARYANTO, S.E
		Desa Kampiri Kecamatan Pammana, Kab. Wajo	Masih rendahnya kualitas olahraga dalam rangka meningkatkan upaya pengembangan keolahragaan sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana olahraga yang memadai (sport center) yang dapat menunjang kegiatan olahraga serta dapat mengembangkan potensi-potensi di bidang olahraga	1 Kegiatan	ALIEF KURNIAWAN
		Lapangan Andi Unru Kecamatan Sajoanging, Kab. Wajo	Belum meratanya prestasi atlet pada setiap cabang olahraga prestasi, sehingga dibutuhkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga (lanjutan pembangunan jogging track)	1 Kegiatan	ASRI JAYA LATIF
		Kecamatan Tempe, Kab. Wajo	Tidak adanya parkir lapangan olahraga bulutangkis sehingga di harapkan pembangunan parkir 20 X 30	1 Kegiatan	FERI SURACHMAT, S.E.,M.A.P
		DESA LEMPA KECAMATAN PAMMANA , Kab. Wajo	PEMBANGUNAN SARANA LAPANGAN SEPAKBOLA DESA LEMPA KECAMATAN PAMMANA	1 Kegiatan	AMSHAR A. TIMBANG, S.H
		jl Rusa Kecamatan Tempe, Kab. Wajo	Minimnya lahan parkir atau jumlah kebutuhan parkir lebih besar dari kapasitas parkir, sehingga dapat mengganggu lalu lintas disekitar, sehingga dibutuhkan untuk dilakukan pembangunan Parkir di tempat Olahraga jl.rusa kompleks stadion andi ninong 20 X 50	1 Kegiatan	FERI SURACHMAT, S.E.,M.A.P
	<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat	Cinnongtabi Kecamatan Majauleng, Kab. Wajo	Kejuaraan Motor Taksi Gabah di Cinnongtabi Kecamatan Majauleng	1 Kegiatan	ANDI TRI SAKTI
		Kecamatan Pitumpanua, Keera, Kab. Wajo	berdasarkan aspirasi dari anak muda dapil IV untuk pelaksanaan turnamen Volly sehingga diharapkan bantuan pelaksanaan turnamen Volly di Kecamatan Pitumpanua & Keera	1 Kegiatan	ANDI SARIFUL AKLAM DARAKUTNI
		Kecamatan Pitumpanua, Keera, Kab. Wajo	berdasarkan aspirasi dari anak muda dapil IV untuk pelaksanaan turnamen Volly sehingga diharapkan bantuan pelaksanaan turnamen Volly di Kecamatan Pitumpanua & Keera	1 Kegiatan	ANDI SARIFUL AKLAM DARAKUTNI
	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>				
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kecamatan Tempe, Kab. Wajo	Masih minimnya Sistem pengembangan hingga sistem pelatihan karena kurang sadar dengan pengetahuan proses pembinaan atlet yang benar sehingga dibutuhkan untuk dilakukan pembinaan dan pelatihan atlet Bulutangkis	1 Kegiatan	FERI SURACHMAT, S.E.,M.A.P
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				

	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>				
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Wajo, Kab. Wajo	Adanya permintaan wara untuk dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pemuda untuk kegiatan saka pariwisata cabang Wajo	1 Kegiatan	H.J. ANDI SULEHA SELLE, SH
4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
	<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>				
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo, Kab. Wajo	Pengembangan dan Penataan Wisata Desa Nepo (Danau Tempe) : a. pembangunan 4 buah Gazebo 2,5 m x 2,5 m b. pembangunan pintu gerbang 6,5 m c. pembangunan Pujasera untuk kuliner (20 unit)	1 Kegiatan	H.MUSTAFA,S H,.M.Si
		DESA NEPO (DANAU TEMPE) KEC. TANASITOLO, Kab. Wajo	PENGEMBANGAN DAN PENATAAN WISATA DESA NEPO (DANAU TEMPE) KEC. TANASITOLO, MELALUI PEMBANGUNAN 4 BUAH GAZEBO DENGAN UKURAN 2,5 m dan 2,5 m	1 Kegiatan	H.MUSTAFA,S H,.M.Si
		DESA NEPO KEC. TANASITOLO, Kab. Wajo	PENGEMBANGAN DAN PENATAAN WISATA DESA NEPO (DANAU TEMPE) KEC. TANASITOLO, MELALUI PEMBANGUNAN PINTU	1 Kegiatan	H.MUSTAFA,S H,.M.Si
		DESA NEPO KECAMATAN TANASITOLO, Kab. Wajo	PENGEMBANGAN DAN PENATAAN WISATA DESA NEPO (DANAU TEMPE) KEC. TANASITOLO, DENGAN ADANYA USULAN PEMBANGUNAN PUJASERA UNTUK KULINER SEBANYAK 20 UNIT LENGKAP DENGAN PENGADAAN 20 MEJA DAN 80 KURSI BERBAHAN BESI. (VOLUME = 20 PAKET)	1 Kegiatan	H.MUSTAFA,S H,.M.Si
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
	<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>				
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kecamatan Tempe, Kab. Wajo	sangat di perluhhkan event budaya kreatif, seperti lomba foto seni budaya. pameran foto senibudaya milenial tingkat pelajar/mahasiswa, lomba permainan tradisi budaya, lomba kirabbudaya dari bahan bekas bermotif sutra apresiasi buat kreatifitas peserta	1 Kegiatan	H.RISMAN LUKMAN.,SP., M.Si
		Kecamatan Maningpajo dan Kecamatan Belawa, Kab. Wajo	untuk meningkatkan penjualan dengan sistem online sehingga dibutuhkan pelatihan konten kreator bagi pelaku UMKM	1 Kegiatan	APRILLANI,S.K ep.,NS

Tabel 2.6
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2025
Kabupaten Wajo

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
	<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jl. H. Andi Oddang, Dusun Atapange, Kecamatan Majauleng Kab. Wajo	LAPANGAN BASKET dan LAPANGAN FUTSAL agar bisa menunjang kebutuhan para generasi muda yang gemar berolahraga		
		Dusun Totakki Desa Akkotengeng, Kecamatan sajoanging Kab. Wajo	Sarana Prasarana Lapangan Sepak Bola untuk menunjang anak Mudah Berolahraga.		
		Jalan Poros Polewalie, Kecamatan Gilireng Kab. Wajo	Belum ada sarana prasarana untuk lapangan sepak bola		
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
	<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>				
	Pengadaan/Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dusun Salotenga, Kecamatan Sabbangparu Kab. Wajo	kurangnya minat wisatawan yang berkunjung karena sarana dan prasarana tidak memadai		
	Pengadaan sarana prasarana pariwisata	DESA LOMPOLOANG, Kecamatan Pitumpanua Kab. Wajo	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA WISATA BUKIT HIJAU DESA LOMPOLOANG 3 UNIT HOMESTAY		

Tabel 2.7
Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat dengan Rancangan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Urusan Wajib											
Kepemudaan dan Keolahragaan											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rata-rata realisasi output kegiatan Perangkat Daerah	100%	4,206,950,631						
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Disporapar</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 dokumen	2,500,000						
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1 dokumen	2,000,000						
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2,500,000						
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2,000,000						

			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	10,000,000						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	10,000,000						
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Laporan	2,000,000						
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Laporan	2,000,000						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 data	2,000,000						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Berita Acara	4,000,000						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,000,000						
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,000,000						

	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 data	2,000,000						
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	4,000,000						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disporapar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	3,769,850,631						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,500,000						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1,500,000						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	3,769,850,631						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,500,000						

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1,500,000						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disporapar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	10,000,000						
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3,000,000						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3,000,000						
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	10,000,000						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	10,000,000						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	10,000,000						
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3,000,000						
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3,000,000						

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	10,000,000						
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	10,000,000						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disporapar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1,000,000						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1,000,000						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1,000,000						
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1,000,000						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	1,000,000						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	56,500,000						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1,000,000						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1,000,000						

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1,000,000						
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1,000,000						
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	1,000,000						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	56,500,000						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disporapar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	5,000,000						
			Tersedianya Mebel	1 Unit	10,000,000						
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11,000,000						
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15,000,000						
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	5,000,000						
	Pengadaan Mebel		Tersedianya Mebel	1 Unit	10,000,000						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11,000,000						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15,000,000						

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disporapar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	237,100,000						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	237,100,000						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disporapar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	6 Unit	15,000,000						
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	3,000,000						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3,000,000						
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/rehab	1 Unit	3,000,000						

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	6 Unit	15,000,000						
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	3,000,000						
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3,000,000						
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/rehab	1 Unit	3,000,000						
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Rasio wirasauha pemuda	100%	31,847,000						
	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Wirasaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10 Orang	11,847,000						
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	5 Orang	5,000,000						
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	5,000,000						
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirasaha pemula Tingkat Kabupaten/kota		Jumlah Wirasaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10 Orang	11,847,000						

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	5 Orang	5,000,000						
	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat		Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	5,000,000						
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Wajo	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	5,000,000						
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	10 Orang	5,000,000						
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	5,000,000						
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	10 Orang	5,000,000						
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Persentase Atlet yang masuk Pelatnas	100%	3,436,673,879	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Persentase Atlet yang masuk Pelatnas	100%	2,001,673,879	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	6 Unit	2,001,673,879	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan	Kab. Wajo	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	6 Unit	2,001,673,879	

						Daerah Kabupaten/Kota					
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	6 Unit	2,001,673,879	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	6 Unit	2,001,673,879	usulan masyarakat
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 kejuaraan	500,000,000						
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	10 Orang	100,000,000						
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	500,000,000						
	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	10 Orang	100,000,000						
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Wajo	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	15 Orang	50,000,000						
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	5 Orang	100,000,000						
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	15 Orang	100,000,000						

			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	25,000,000						
	Seleksi Atlet Daerah		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	15 Orang	50,000,000						
	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga		Jumlah penerima Penghargaan olahraga	5 Orang	100,000,000						
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota		Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	15 Orang	100,000,000						
	Pembentukan dan penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota		Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	25,000,000						
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kab. Wajo	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota		400,000,000						
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400,000,000						
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kab. Wajo	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		35,000,000						
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		50,000,000						
			Jumlah Prasarana dan Sarana olahraga rekreasi kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		25,000,000						

			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi		50,000,000						
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	35,000,000						
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Laporan	50,000,000						
	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan		Jumlah Prasarana dan Sarana olahraga rekreasi kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Unit	25,000,000						
	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional		Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	50,000,000						
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Tingkat partisipasi masyarakat dalam Kepramukaan	100%	125,500,000						
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		100,000,000						
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		5,500,000						
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		5,000,000						

			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan		15,000,000						
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	100,000,000						
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	5 Orang	5,500,000						
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	5,000,000						
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan		Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	15,000,000						
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	100%	7,766,854,000	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	100%	6,736,854,000	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		300,000,000						
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		100,000,000						
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	50 Lokasi	300,000,000						
	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000						

	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		50,000,000						
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		20,000,000						
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		50,000,000						
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		20,000,000						
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		350,000,000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		100,000,000			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		6,736,854,000			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		6,736,854,000	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		30,000,000			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 Lokasi	350,000,000						

	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000						
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	6,736,854,000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	6,736,854,000	Usulan masyarakat
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	30,000,000						
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan		50,000,000						
			Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Usahnya		30,000,000						
	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko		Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	10 Pelaku Usaha	50,000,000						
	Pelaksanaan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah		Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Usahnya	10 Badan Usaha	30,000,000						
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	100%	309,768,300						
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		50,000,000						

			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		209,768,300						
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		50,000,000						
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	50,000,000						
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	209,768,300						
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	50,000,000						
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	100%	360,000,000						
	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia		360,000,000						
	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif		Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia		360,000,000						

	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	175,000,000						
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Wajo	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		100,000,000						
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata		50,000,000						
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		25,000,000						
	Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	100,000,000						
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	50 Orang	50,000,000						
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	25,000,000.00						

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM
DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD

Pelaksanaan tupoksi setiap OPD tidak dapat dipisahkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional dan provinsi. Pembangunan nasional yang dilaksanakan adalah bersifat komprehensif dan sinergis, yaitu memiliki arti bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Sejalan dengan implementasi otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah merupakan ujung tombak pembangunan nasional.

Semua urusan yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah dibagi habis dalam setiap OPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Isu-isu strategis yang merupakan fenomena nyata yang wajib dicermati dan diidentifikasi dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata merupakan OPD yang melaksanakan urusan bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Dengan memperhatikan Renstra Kemenpar, Renstra Kemenpora dan Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan maka untuk kesinambungan dan keselarasan dengan Kebijakan Nasional Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2026 adalah upaya untuk mewujudkan daya saing, daya jual dan kualitas di bidang pariwisata, pemuda maupun olahraga dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada.

Adapun identifikasi isu-isu strategis yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dapat dilihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

NO	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
A	NASIONAL		
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 Bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Bappenas (RPJMN 2020-2024)	Fokus pada peningkatan kualitas SDM muda, prestasi olahraga, dan promosi pariwisata berkelanjutan
2	Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)	Perpres No. 86 Tahun 2021	Strategi nasional untuk meningkatkan prestasi olahraga secara sistematis dan berkelanjutan
3	Strategi Nasional Pengembangan Kepemudaan	Kemenpora	Mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan dan peningkatan kapasitas pemuda
4	Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPARNAS)	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Menetapkan arah pembangunan pariwisata nasional
B	PROVINSI		
1	Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Aksi Kepemudaan dan Olahraga Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2023	Menyesuaikan kebijakan nasional ke dalam rencana aksi tingkat daerah
2	Program Unggulan Pariwisata Daerah seperti "Desa Wisata", "Event Daerah", dan "Festival Budaya Daerah"	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan	Meningkatkan daya tarik wisata dan memberdayakan masyarakat lokal

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA OPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan i isu-isu tren yang berkembang kearah perubahan. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Sesuai Perencanaan Staretgis Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda, Olagraa dan Pariwisata Kabupaten Wajo yaitu:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya nilai tambah ekonomi melalui kewirausahaan, ekonomi kreatif, potensi dan prestasi pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	76,76
		Meningkatnya kewirausahaan pemuda	Persentase wirausaha muda	%	56,20%
		Meningkatnya pembinaan olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	12,10%
		Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB sektor pariwisata	%	1,10%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap SPM

Tabel 4.1
Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap SPM
Tahun 2026

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan
Tidak ada target pencapaian SPM	

4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap TPB/SDGs

SDGs/TPB ini adalah pembangunan nasional yang membutuhkan sinergi kebijakan perencanaan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Dalam bentuk indicator, kegiatan dan program yang terukur dan juga indikasi dukungan pembiayaan sehingga bisa dikatakan jika semua target TPB/SDGs di tingkat nasional sudah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Adapun dukungan rencana program kegiatan dan sub kegiatan dan indikasi dukungan anggaran terhadap TPB/SDG tahun 2024 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap TPB/SDGs
Tahun 2024

Kode					Indikator TPB/SDGs	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Target 8.9.1 *					Proporsi dan laju kontribusi pariwisata terhadap PDB				
3	26	02				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata	0.10%	213,000,000
3	26	02	203			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata kab/kota yang dikelola	1 Destinasi	7.761.341.000
3	26	02	203	04		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	7.749.700.000
3	26	02	203	06		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	11.614.000
3	26	02	2.04			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata daerah yang diterbitkan	10 Rekomendasi	5.540.000
3	26	02	204	07		Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	10 Usaha	5.540.000
3	26	03				Program Pemasaran Pariwisata	Kunjungan wisata	36.06%	309.768.300
3	26	03	2.01			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi, kawasan, daya tarik wisata Kab/Kota yang dipasarkan dalam dan luar negeri	32 objek	309.768.300
3	26	03	2.01	06		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	297.487.500
3	26	03	2.01	07		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	12.280.800
JUMLAH									8.071.082.300

4.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan OPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional. Kemudian penjelasan mengenai kegiatan yang bertambah atau berbeda nama dari Renstra Perangkat Daerah.

Berikut ditampilkan rumusan rencana program dan kegiatan OPD pada Tahun 2026 dan perkiraan maju Tahun 2027.

Tabel 4.3

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Wajo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpo k Sasa ran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasi onal	Daerah				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							28.213.749.071,00							25.520.649.071,00	
2							26.496.749.071,00							23.355.649.071,00	
2	1						26.496.749.071,00							23.355.649.071,00	
2	1	0					4.105.749.071,00							4.335.649.071,00	
2	1	0	2.0				73.500.000,00							98.000.000,00	
2	1	0	2.0	00											
9	1	1	1	01											

						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	23.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DISP ORA PAR
2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DISP ORA PAR
2	19	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DISP ORA PAR
2	19	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DISP ORA PAR
2	19	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DISP ORA PAR
2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DISP ORA PAR

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	2.766.149.071,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.766.149.071,00	DISP ORA PAR
2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DISP ORA PAR
2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DISP ORA PAR
0	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD tepat waktu	-			100 %	165.000.000,00			-	-	-	-	225.000.000,00	
2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	40.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DISP ORA PAR
2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DISP ORA PAR
2	19	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DISP ORA PAR
2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	-			100 %	424.100.000,00			-	-	-	-	480.000.000,00	
2	1	0	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.600.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	DISP ORA PAR
2	1	0	2.0	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	15.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DISP ORA PAR
2	1	0	2.0	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	6.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.500.000,00	DISP ORA PAR
2	1	0	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000,00	DISP ORA PAR
2	1	0	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		450.000.000,00	DISP ORA PAR
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			6 Unit	185.000.000,00			-	-	-	-	215.000.000,00	
2	19	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	60.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	DISP ORA PAR
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DISP ORA PAR
2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	25.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DISP ORA PAR
2	19	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	50.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DISP ORA PAR
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	-			100 %	388.000.000,00			-	-	-	-	420.000.000,00	
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	40.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DISPAR
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	20.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DISPAR
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	328.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DISPAR
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	-			100 %	96.000.000,00			-	-	-	-	121.500.000,00	
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	40.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	DISPAR
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	6.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.500.000,00	DISPAR
2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	DISPAR

2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Pembinaan Kepemudaan	-				100 %	340.000.000,00						430.000.000,00		
2	1	0	2.0		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan	-				100 %	220.000.000,00			-	-	-	-	365.000.000,00	
2	1	0	2.0	00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota															
						Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda					50 Orang	50.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DISP ORA PAR
2	1	0	2.0	00	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota															
						Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi					10 Orang	10.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DISP ORA PAR
2	1	0	2.0	00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota															
						Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda					30 Orang	60.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	DISP ORA PAR

2	1	0	2.0	00	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
	9	2	1	16		Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		155.000.000,00	DISP ORA PAR
2	1	0	2.0		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OKP yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	-			100 %	120.000.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	
2	1	0	2.0	00	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
	9	2	2	03		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	120.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	DISP ORA PAR
2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	-			100 %	21.721.000.000,00						-	18.215.000.000,00	
2	1	0	2.0		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Area Sport yang representatif	-			100 %	17.085.000.000,00			-	-	-	-	15.000.000.000,00	
2	1	0	2.0	00	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
	9	3	1	05		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				3 Unit	17.085.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000.000,00	DISP ORA PAR

2	1	0	2.0		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prestasi olahraga	-			8 Cabor	2.200.000.000,00			-	-	-	-	730.000.000,00	
2	1	0	2.0	00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
						Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	2.000.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DISP ORA PAR
2	1	0	2.0	00	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
						Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				10 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		230.000.000,00	DISP ORA PAR
2	1	0	2.0		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet berprestasi ditingkat provinsi	-			33 Atlet	916.000.000,00			-	-	-	-	930.000.000,00	
2	1	0	2.0	00	Seleksi Atlet Daerah														
						Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				12 Orang	50.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DISP ORA PAR
2	1	0	2.0	00	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
						Jumlah penerima Penghargaan olahraga				10 Orang	550.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DISP ORA PAR
2	1	0	2.0	00	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota														

						Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				12 Orang	300.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		360.000.000,00	DISP ORA PAR	
2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota															
						Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				1 Dokumen	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DISP ORA PAR	
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	-			1 Organisasi	1.300.000.000,00				-	-	-	-	1.300.000.000,00	
2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait															
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1.300.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.300.000.000,00	DISP ORA PAR	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan	-			2 Cabor	220.000.000,00				-	-	-	-	255.000.000,00	
2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi															
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DISP ORA PAR	
2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan															
						Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		170.000.000,00	DISP ORA PAR	

						Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DISP ORA PAR		
2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan																
						Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				1 Organisasi	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DISP ORA PAR		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.717.000.000,00									2.165.000.000,00	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						1.717.000.000,00									2.165.000.000,00	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PAD sektor pariwisata	-			0,15 %	675.000.000,00						-	1.015.000.000,00			
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata kab/kota yang dikelola	-			3 Destinasi	655.000.000,00						-	991.000.000,00			
3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DISP ORA PAR		
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																
						Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	300.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DISP ORA PAR		

3	2	0	2.0	00	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
	6	2	3	04		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				3 Unit	200.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DISP ORA PAR
3	2	0	2.0	00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
	6	2	3	06		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DISP ORA PAR
3	2	0	2.0	00	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota														
	6	2	3	08		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DISP ORA PAR
3	2	0	2.0	00	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
	6	2	3	10		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DISP ORA PAR
3	2	0	2.0		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata daerah yang diterbitkan	-			10 Rekomendasi	20.000.000,00			-	-	-	-	24.000.000,00	
3	2	0	2.0	00	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota														
	6	2	4	09		Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DISP ORA PAR

3	2	0	2.0	00	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota														
	6	2	4	11		Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DISP ORA PAR
3	2	0			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan wisata	-			36,10 %	742.000.000,00						-	793.000.000,00	
3	2	0	2.0		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi, kawasan, daya tarik wisata Kab/Kota yang dipasarkan dalam dan luar negeri	-			32 Obyek	742.000.000,00			-	-	-	-	793.000.000,00	
3	2	0	2.0	00	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														
	6	3	1	03		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DISP ORA PAR
3	2	0	2.0	00	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														
	6	3	1	04		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		230.000.000,00	DISP ORA PAR
3	2	0	2.0	00	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
	6	3	1	05		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	DISP ORA PAR

						Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				50 Orang	70.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DISP ORA PAR
3	2	0	2.0	00	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DISP ORA PAR
3	2	0	2.0		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersedia	-			25 Orang	75.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	
3	2	0	2.0	00	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				25 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DISP ORA PAR

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN
PERANGKAT DAERAH

5.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja perangkat daerah merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir priode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian Indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir priode RPJMD dapat dicapai melalui Renstra

5.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya.

Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo tahun 2026 dan tahun 2027 serta kondisi akhir Renstra tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja (Tahun)		Kondisi Akhir Renstra
			2026	2027	
Meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui kewirausahaan, ekonomi kreatif, potensi dan prestasi pemuda dalam pembangunan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	57,93%	58,38%	57,33%
	PAD Sektor pariwisata	%	0,062%	0,064%	0,050%
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	76,76	79,01	75,26
	Persentase wirausaha muda	%	56,20%	56,50%	55,88%
	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	12,10%	15,60%	100%
	Rasio PDRB sektor pariwisata	%	1,10%	1,15%	1,00%

5.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penetapan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo tahun 2025 dan tahun 2026 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2
Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Asumsi Capaian 2025	Target 2026
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	36%	37%
2	Persentase wirausaha muda	55,88%	56,00%
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	8,90%	12,10%
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikat	6,81%	10,35%
5	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	8,85%	12,22%
6	Jumlah Prestasi Olahraga	30 Cabor	32 Cabor
7	Kunjungan wisata	372.500 Orang	403.000 Orang
8	Lama Kunjungan Wisata	1 Hari	1,1 Hari
9	PAD Sektor Pariwisata	0.60%	0.62%

5.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 5.3
Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan
	Tidak ada target pencapaian SPM

5.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) yang memiliki arti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, menjamin keadilan masyarakat, memastikan tata kelola yang sifatnya menjaga dan meningkatkan kualitas dari generasi ke generasi dan menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat. SDGs/TPB ini adalah komitmen nasional dan global yang memiliki 17 tujuan dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Hal yang menjadi prioritas guna mencapai target dari SDGs/TPB ini adalah pembangun perencanaan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Dalam bentuk indicator, kegiatan dan program yang terukur dan juga indikasi dukungan pembiayaan sehingga bisa dikatakan jika semua target TPB/SDGs di tingkat nasional sudah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Adapun penetapan target TPB/SDGs tahun 2024 dan tahun 2025 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.4
Penetapan TPB/SDGs
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo

Kode Indikator	Target.Indikator	Sumber Data	Satuan	Asumsi Capaian	Target	Keterangan
				2025	2026	
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI						
Tujuan SDG 8	: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua					
Target 8.9	: Pada tahun 2030 , menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal					
Target 8.9.1 *	: Proporsi dan laju kontribusi pariwisata terhadap PDB					
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	BPS	%	0,42	0,43	
8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Disporapar	Orang	2.500	3.000	
8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Disporapar	Orang	370.000	400.000	
8.9.1 ©	Jumlah devisa sektor pariwisata	Disporapar	USD	275.000	330.000	

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo.

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pemuda, Olahraga Pemuda ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya yang memberikan gambaran tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo, Analisis Kinerja Pelayanan dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD serta tujuan dan sasaran Rencana Kerja serta program kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo untuk Tahun 2026.

Keberhasilan dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ini serta hambatan yang ditemukan akan tergambar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKJiP) yang akan disusun setiap tahunnya.

Bab Penutup Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2026 terbagi menjadi 2 sub bab yaitu Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2026 adalah dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan sekaligus menjadi pedoman dalam menyusun renja PD Tahun 2026. RENJA Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo memuat pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu, kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan berikut pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RENJA Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo pada tahun 2026 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). RENJA Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2026 diimplementasikan dengan :

1. Tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah sesuai yang tertuang dalam Rancangan Akhir RENSTRA Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan kabupaten dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026;
3. Melibatkan secara aktif stakeholder di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan di Kabupaten Wajo dalam rangka pemulihan ekonomi dan mencapai target sasaran pembangunan guna mewujudkan tujuan dan sasaran Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029.

Perwujudan prioritas pembangunan tersebut melalui sejumlah arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan/sub kegiatan. Rencana program dan kegiatan/sub kegiatan tahun 2026 selain diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten.

Dokumen RENJA Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif, yang mana nota kesepakatan KUA dan PPAS ini sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RENJA lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD yang mana untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RENJA dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses Pembangunan Daerah, Kunci sukses pembangunan daerah adalah perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan benar benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut diatas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah. RENJA sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan

kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RENJA agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi. Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidak sesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RENJA Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing OPD agar menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2026.
2. OPD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2026 dengan sebaik baiknya. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program Pembangunan.
3. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Pada akhir tahun anggaran 2026, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan

ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

6.2 Kesimpulan

1. RENJA Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2026 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya.
2. RENJA merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2026.
3. Pelaksanaan Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang dimuat dalam Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo untuk Tahun 2025-2029, sehingga program kegiatan dimasing-masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.
4. RENJA Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2026 berfungsi sebagai pedoman penyalarsan prioritas pembangunan sekaligus instrument untuk menjamin sinergitas antar sektor, wilayah dan Tingkat pemerintahan sehingga arah Pembangunan dapat lebih terkoordinasi serta program dan kegiatan OPD maupun pemangku kepentingan lain saling mendukung.
5. RENJA Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2026 menjadi dasar evaluasi kinerja Pembangunan untuk menilai capaian, mengidentifikasi hambatan dan merumuskan Langkah perbaikan.

Sengkang, Agustus 2025

Plt Kepala Dinas,



Drs. ANDL MANUSSA, S.Sos., M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19651128 1990021001

**Format Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Tahun 2026
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Ket
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Ketidak Sesuaian	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembentukan tim penyusun Renja SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja.	√				
2	Pengolahan data dan informasi.	√				
3	Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota.	√				
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-SKPD kabupaten/kota.	√				
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.	√				
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√				
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√				
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√				
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√				
10	Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota.	√				
11	Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√				
12	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.	√				
13	Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√				

14	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota.	v				
15	Sasaran program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	v				
16	Program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD kabupaten/kota.	v				
17	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	v				
18	Dokumen Renja SKPD kabupaten/kota yang telah disyahkan.	v				

